

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia diatur dalam UU No.33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Otonomi ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki sehingga pembangunan daerah dapat bersaing sehat dengan daerah lainnya demi kemajuan bersama.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut maka masyarakat dan pemerintah daerahnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah (Arsyad:109).

Daerah-daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang berbeda jumlah dan kualitasnya hal ini dikarenakan oleh perbedaan letak geografis daerah yang bersangkutan. Perbedaan tersebut menyebabkan pembangunan sektor-sektor ekonomi di setiap daerah harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh tiap daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, penentuan sektor andalan/unggulan untuk dikembangkan adalah satu hal penting dalam suatu perencanaan pembangunan daerah. Secara konseptual, sektor andalan pembangunan ekonomi nasional ialah sektor yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak utama dalam pembangunan ekonomi (*engine of*

development) dalam rangka mewujudkan tujuan nasional secara berkelanjutan. Pertumbuhan yang tinggi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), sedangkan stabilitas yang mantap merupakan syarat kecukupan (*sufficient condition*) dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi sehingga sektor andalan haruslah mampu memacu pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang tinggi dan dapat tumbuh secara berkelanjutan (Syam dan Dermoredjo: 2000).

Sektor pertanian selama ini masih memegang peranan penting baik di tingkat nasional maupun regional, namun peranan tersebut cenderung menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang mencerminkan suatu proses transformasi struktural (Ikhsan dan Armand: 1993). Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional antara lain adalah menyediakan kebutuhan bahan pangan, menyediakan bahan baku industri, sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri, sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain, sumber perolehan devisa (Kuznets 1964, dikutip dari tulisan Harianto : 2007).

Agroindustri sebagai subsistem pertanian mempunyai potensi sebagai pendorong pertumbuhan kawasan ekonomi karena memiliki peluang pasar yang lebih luas dan nilai tambah (*value added*) yang besar. Disamping itu, pengembangan agroindustri dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) proses transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. (Habibie, Nono dan Wardani, 1995, dikutip dari tulisan Mukhyi).

Sampai dengan tahun 1991 sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan

Indonesia dalam penciptaan PDB, namun sejak tahun 1992 peran sektor ini mulai tergeser oleh sektor industri dan terus menurun peranannya, walaupun besaran absolut sektor pertanian meningkat. Hingga tahun 2006 nilai sektor pertanian mengalami fluktuasi. PDB pada triwulan pertama tahun 2006 meningkat sebesar 2,14 dibandingkan tahun 2005 pada triwulan empat. Pertumbuhan PDB triwulan empat tahun 2005 dan triwulan pertama tahun 2006 ini terjadi pada sektor pertanian 3,21%, konstruksi 3,14%, pengangkutan dan komunikasi 5,03%, keuangan-real estate-jasa perusahaan 1,84%, pertambangan dan penggalan 2,23%, industri pengolahan 1,10%, listrik, gas dan air bersih 3,48% dan sektor jasa 1,55%. (<http://www.bps.go.id>).

Hal yang sama juga terjadi di Propinsi Lampung, dimana sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah menyusut tiap tahunnya. Struktur ekonomi Propinsi Lampung masih didominasi sektor pertanian, ini terlihat dari *share* PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB triwulan II-2009, yang mencapai 41,4 persen (www.bi.go.id/NR/rdonlyers/../).

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung dengan luas wilayah 4.789,82 km² mengalami pertumbuhan ekonomi cukup maju. Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua untuk Propinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung beberapa tahun terakhir ini.

Tabel 1. Peranan Sektor Pertanian di Daerah Otonom Prop. Lampung Tahun 2002-2007 (persen)

Kabupaten/Kota	Peranan						Perubahan 2002-2007
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1.Lampung Barat	62,80	62,80	61,72	62,35	61,04	60,66	-0,43
2.Tanggamus	52,64	52,00	52,41	52,50	52,39	53,13	0,10
3.Lampung Selatan	49,57	48,72	46,57	46,70	44,52	43,36	-1,24
4.Lampung Timur	43,49	41,11	41,33	38,09	37,74	38,01	-1,10
5.Lampung Tengah	49,11	48,77	47,94	47,23	46,00	44,93	-0,84

6.Lampung Utara	43,94	41,09	37,25	33,94	32,90	31,77	-2,43
7.Way Kanan	60,80	60,15	57,65	54,89	49,87	48,87	-2,39
8.Tulang Bawang	34,08	42,64	42,74	43,29	44,08	45,44	2,27
9. Pesawaran	-	-	-	-	49,96	49,91	-
10.Bandar Lampung	5,05	5,14	5,21	4,96	5,49	5,95	0,18
11. Metro	19,53	16,49	15,36	14,38	13,62	12,52	-1,40

Sumber : BPS Propinsi Lampung

Dari Tabel 1 terlihat bahwa selama periode 2002-2007 kontribusi sektor pertanian di seluruh kabupaten/kota di Propinsi Lampung secara rata-rata cenderung menurun kecuali Tulang Bawang yang meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,27 %. Sedangkan kabupaten lain yang mengalami penurunan di atas 1 persen antara lain adalah Kabupaten Lampung Selatan (1,24 %), Lampung Timur (1,10 %), Lampung Utara (2,43%), Way Kanan (2,39%), dan Kota Metro (1,40%). Sedangkan Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan sebesar 0,84 %.

Visi Kabupaten Lampung Tengah adalah terwujudnya Lampung Tengah sebagai kawasan agribisnis yang berwawasan lingkungan, religius dan keragaman budaya dengan salah satu misinya yaitu mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis dan perekonomian kerakyatan yang didukung dunia usaha. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian kabupaten tersebut masih bertumpu pada sektor pertanian.

Dalam proses pelaksanaan sistem produksi pertanian, lahan pertanian merupakan faktor utama yang harus terjamin kelestariannya dimana luas dan produktivitas lahan harus ditingkatkan untuk mengimbangi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kenyataanya, pembangunan pertanian Kabupaten Lampung Tengah menghadapi permasalahan struktural, yaitu penyempitan luas pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang antara lain disebabkan oleh konversi penggunaan lahan pertanian untuk kebutuhan lainnya.

Penyempitan luas penguasaan lahan pertanian ini misalnya saja pada lahan sawah yang diandalkan sebagai penghasil bahan pangan utama cenderung menurun luas bakunya akibat konversi ke non-pertanian. Hal ini terbukti dari menurunnya luas lahan sawah selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 1998 luas lahan sawah fungsi mencapai 86.033 Ha dan pada tahun 2007 luasnya menurun hingga 49.575 Ha (*BPS Kabupaten Lampung Tengah : 2007*).

Penelitian Abdurachman Adimihardja di Balai Penelitian Tanah tentang Strategi Mempertahankan Multifungsi Pertanian Di Indonesia menemukan bahwa gencarnya pembangunan sektor non-pertanian juga turut mempengaruhi konversi lahan pertanian dimana para pengusaha di sektor non-pertanian juga membutuhkan lahan yang siap pakai terutama ditinjau dari karakteristik biofisik dan asesibilitas yang umumnya terpenuhi oleh lahan pertanian beririgasi (Adimihardja, 2006 : 99).

Gencarnya pembangunan sektor baik sektor pertanian maupun non-pertanian bisa ditunjukkan oleh besarnya jumlah pengusaha berdasarkan Tanda Daftar Perdagangan (TDP) menurut sektor seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. Banyaknya Pengusaha Berdasarkan TDP Menurut Sektor Yang Diterbitkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Kabupaten Lampung Tengah 2002-2006

No	Sektor Usaha	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	-	-	9	5	7
2.	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	22	69	82	103	212
4.	Listrik, Gas & air minum	1	1	-	-	-
5.	Bangunan	24	8	1	2	-
6.	Perdagangan & hotel	325	275	451	576	628
7.	Angkutan, Penggudangan dan komunikasi	3	1	10	16	19
8.	Keuangan	2	2	14	10	4
9.	Jasa sosial kemasyarakatan	20	24	2	2	8
10.	Kegiatan lainnya	7	5	-	-	1
	Jumlah	404	358	569	714	879

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa peningkatan pengusaha berdasarkan TDP selama tahun 2002-2006 di sektor non-pertanian khususnya sektor perdagangan dan hotel dan sektor industri lebih banyak dibandingkan dengan sektor pertanian. Hal ini berarti akan mempengaruhi luas penggunaan lahan untuk pembangunan sektor-sektor yang ada dan akan mempengaruhi perkembangan sektor pertanian yang merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Lampung Tengah .

Karena berbagai faktor yang terjadi dalam suatu proses pembangunan daerah dan perkembangan sektor pertanian tersebut maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan analisis *shift share* dengan indikator nilai tambah sektor dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Oleh karena itu, penulisan ini saya beri judul "Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1998-2007".

B. Permasalahan

Dengan melihat latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tahun 1998 sampai dengan tahun 2007 berdasarkan analisis *shift share*?
2. Bagaimana kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1998-2007?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui apakah terjadi suatu pergeseran/perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tahun 1998-2007 yang ditandai dengan menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya peranan sektor industri, perdagangan dan jasa.

2. Mengetahui besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1998-2007.

D. Kerangka Pemikiran

Prof.Simon Kuznets dalam ML.Jhingan (2000:57) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berkelanjutan. Namun pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung, diantaranya sumber kakayaan alam, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan teknologi, serta sistem sosial dan sikap masyarakat.

Perekonomian negara sedang berkembang umumnya berorientasi pada sektor pertanian, dengan tingkat produktivitas, pendapatan, tabungan dan investasi yang rendah (ML.Jhingan, 2000:365). Dengan menaikkan *output* dan produktivitas pertanian, sektor pertanian dapat memberikan sumbangan bersih kepada industrialisasi negara itu. Dengan perkembangan sektor pertanian ini diharapkan produksi pangan dan hasil ekspornya akan semakin besar serta memberikan penerimaan devisa yang meningkat dan perluasan sektor perekonomian lainnya. Selain itu, sektor pertanian masih diharapkan menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Perluasan sektor perekonomian juga akan memacu terjadinya transformasi perekonomian yang mempunyai dampak positif dan negatif. Seperti yang dituliskan Michael.P.Todaro bahwa upaya menyesuaikan struktur pertanian dalam rangka memenuhi tuntutan atau

permintaan bahan pangan yang semakin meningkat itu juga meliputi perubahan-perubahan yang mempengaruhi seluruh struktur sosial, politik, dan kelembagaan masyarakat pedesaan.

Proses transformasi perekonomian yang diharapkan adalah transformasi perekonomian yang matang atau seimbang secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa penurunan pangsa relatif sektor pertanian dalam perekonomian diiringi atau diimbangi oleh penurunan persentase tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin tingginya pangsa relatif sektor industri dan jasa diikuti oleh peningkatan persentase tenaga kerja yang berada di bawah sektor industri dan jasa.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah perlu diketahui kinerja masing-masing sektor yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian ini digunakan analisis *shift share* dan *location quotient* (LQ). Analisis *shift share* pertama kali dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943). Analisis ini digunakan untuk menganalisis perubahan ekonomi suatu variabel regional sektor/industri dalam suatu daerah. Analisis *Shift-share* juga merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional maupun lokal. Sedangkan analisis LQ digunakan untuk mengetahui suatu sektor apakah termasuk dalam sektor basis atau sektor non-basis.

Dengan melihat gambaran kerangka pikir di atas, penulis ingin mengetahui apakah terjadi suatu pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah selama jangka waktu 1998-2007 dan mengetahui besarnya peranan sektor pertanian dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten.